



Jagongan Jaga Warga Bersama Satpol PP DIY

Eko Suwanto: Harapan Rakyat APBD DIY Jadi Stimulus Penciptaan Lapangan Kerja

YOGYA, TRIBUN - Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto menyebut, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DIY merupakan stimulus anggaran untuk menumbuhkan perekonomian rakyat. Hal itu lantaran APBD DIY terbatas, jika dibandingkan jumlah penduduk di DIY.

"APBD DIY itu kurang lebih Rp6 triliun, Kota Yogyakarta Rp1,8 triliun, Sleman Rp2,8 triliun, dan seterusnya. Kalau ditotal dengan stimulus kabupaten/kota, dana desa itu Rp16 triliun. Anggaran ini kalau kita baca seperti banyak, tetapi nggak banyak," katanya dalam Jagongan Jaga Warga di Gedung Madu Nusantara, Yogyakarta, Selasa (12/9).

"Nah, agar menjadi stimulus perekonomian, APBD ini perlu difokuskan untuk penciptaan lapangan kerja dan kemiskinan. Angka kemiskinan di DIY masih tinggi, 11,49 persen. Kemudian, angka pengangguran masih sekitar 4 persen. Maka, perlu atensi agar APBD ini muaranya untuk rakyat," sambung Politisi PDI Perjuangan.

Ketua DPDPDI Perjuangan Kota Yogyakarta ini mengapresiasi langkah Kota Yogyakarta melalui program Gandeng Gendong hingga Kabupaten Kulon Progo dengan program Bela Beli Kulon Progo. Keberadaan Perda Perlindungan Pangan Segar itu, dinilai, turut

mendukung produk lokal DIY.

Masyarakat DIY juga patut bersyukur, karena ditambah suntikan anggaran melalui Dana Keistimewaan. Bahkan saat ini, anggaran Danais bisa dikelola langsung oleh kalurahan. Hanya saja, belum semua kalurahan bisa mengelola Danais secara maksimal, di antaranya Kota Yogyakarta.

Karena itu, Eko Suwanto mendorong revisi Pergub Nomor 25 Tahun 2019, sehingga kalurahan di Kota Yogyakarta tak hanya sebagai staf kemantren belaka. Dengan begitu, kalurahan di Kota Yogyakarta juga bisa mengelola Danais, sama halnya kalurahan lainnya.

"Sehingga nanti, kalurahan itu menjadi tiga pusat kegiatan, yaitu pusat pelayanan publik, pusat pertumbuhan ekonomi rakyat, dan pusat kebudayaan. Sehingga, anggaran itu ditaruh di kalurahan, dikelola, sama di Sleman dana kalurahan dari Kemendagri itu. Tetapi, ya personelnya ditambah, kesejahteraannya juga," terang Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DIY.

Menurut Eko, APBD yang pro rakyat dapat mencukupi kebutuhan sandang, pangan, dan papan, kemudian ketersediaan akses kesehatan, pendidikan, dan lainnya. Termasuk, rasa aman dan nyaman.

Sementara Komisi C DPRD Kota Yogyakarta, Endro Sulaksono menerangkan, pembahasan terkait revisi



Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto memberikan arahan kepada Jagawarga mengenai penggunaan HT. (12/9)



Keakraban Eko Suwanto Ketua Komisi A DPRD DIY dengan Jagawarga setelah acara Jagongan Jagawarga Selesai. (12/9)

Pergub Nomor 25 Tahun 2019 masih digodok. Ia pun berharap, pembahasan tersebut dapat segera selesai, sehingga Danais bisa dikelola optimal.

"Sehingga harapan kami, RT, RW, Posyandu bisa mendapatkan anggaran Danais. Saat ini, masih dibahas, semoga secepatnya bisa selesai," terangnya.

Di samping itu, Endro juga mendorong masyarakat untuk menyampaikan aspirasi kepada anggota DPRD

melalui reses. Dengan demikian, penggunaan APBD bisa sesuai kebutuhan masyarakat.

Pada kesempatan sama, Kabid Bangtas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DIY, Joko Nuryanto menambahkan, Danais dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan rompi dan HT bagi kelompok Jaga Warga di DIY. Ia berharap, bantuan tersebut dapat mempermudah komunikasi dalam cipta kondisi di wilayah

masing-masing.

"Memang belum optimal karena belum ada repeater, baru diusahakan. Tapi paling tidak, HT ini bisa dioptimalkan di wilayah masing-masing dulu. Harapannya, dapat mempermudah dalam koordinasi terutama dalam cipta kondisi di DIY," ucapnya. (maw/ord)



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005